

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
TINGKAT SMP DI KOTA SEMARANG
(*Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang*)**

Oleh :

Winda Sofianty, Margaretha Suryaningsih, AUFARUL MAROM

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilatarbelakangi oleh terkait rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin karena tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian Pemerintah mengupayakan agar siswa dari kelompok miskin dapat terus bersekolah tanpa adanya hambatan dalam pemenuhan biaya sekolah dengan mengeluarkan suatu program yaitu bantuan siswa miskin (BSM). Kebijakan ini berpijak pada peraturan presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian implementasi ini adalah untuk mengetahui Implementasi dan faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang (*Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang*). Tujuan tersebut dapat tercapai melalui implementasi dan faktor yang mendorong dan menghambat implementasi menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP 27 Semarang sudah dapat membantu siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, jumlah personil yang masih terbatas serta pengawasan yang belum optimal.

Kata kunci : Program, Implementasi kebijakan, Bantuan Siswa Miskin (BSE), SMP.

**THE IMPLEMENTATION OF POLICY PROGRAMS HELP POOR STUDENTS (BSM) LEVEL JUNIOR HIGH SCHOOLS IN SEMARANG CITY
(*Study In Junior High Schools 27 Semarang*)**

Oleh :

Winda Sofianty, Margaretha Suryaningsih, AUFARUL MAROM

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The aid program poor students (BSM) supported by related to the low participation in education especially on the poor because of high cost of education either directly or indirectly. Then the government seek to students from the poor can continue to go to school without the obstacles in the fulfillment of the cost of schools by issuing a program that is help poor students (BSM) . This policy rests on a presidential regulation (Perpres) no. 15 years in 2010 on the acceleration of poverty reduction . The implementation of this research is to find out the factors influencing the implementation and to identify factors supporting and policy implementation, poor students level junior high schools in semarang city (Study in junior high school 27 Semarang). This objective can be achieved through the process of implementation and the factors affecting implementation according to george c .Edward iii namely communication , resources ,disposition , bureaucracy and structures. The results of this research show that the Policies Help poor students (BSM) at Junior High School 27 Semarang can already help students to be able to continue his education, although in practice there are still various obstacles such as the lack of socialization, the number of personnel is still limited as well as the supervision has not been optimal.

Keywords: Program, policy implementation, Help poor students (BSM), Junior High School

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam peraturan presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kota Semarang sendiri adalah salah satu Kota di Jawa Tengah yang juga dijadikan sasaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin yang mana ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang NOMOR : 1804/0445/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin di Kota Semarang. Di Kota Semarang sendiri permasalahan putus sekolah akibat kurangnya kemampuan ekonomi juga merupakan hal yang

sangat menjadi perhatian dimana masih banyak anak-anak dari keluarga miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang menjamin, sehingga banyak dari anak-anak berkeluarga miskin tersebut putus sekolah karena tidak mampu memenuhi tuntutan yang ada.

Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya, namun banyak di temui hambatan dan permasalahan dalam prosesnya di Indonesia maupun dalam lingkup Kota Semarang sendiri. Permasalahan Yang terjadi di Kota Semarang sendiri seperti persyaratan yang susah, ketidak validnya data penerima, dana yang disalahgunakan oleh orangtua siswa yang mana itu dikarekan belum mengerinya orangtua siswa tentang program BSM.

Dari permasalahan yang ada di publik dan bagaimana pelaksanaan akan Program Bantuan Siswa Miskin khususnya ditingkat SMP di Kota Semarang maka peneliti tertarik untuk membahas "*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP di Kota Semarang (Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang)*"

B. TUJUAN

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor

Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMP di Kota Semarang

C. TEORI

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. (Irfan Islamy, 2002 : 18)

Implementasi kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang dilihat melalui prinsip-prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif menurut Riant Nugroho (2011:650), antara lain:

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

Efektivitas implementasi kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat dari model implementasi George Edward III (Agustino, 2006 : 149), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Struktur Birokrasi
4. Disposisi

D. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Situs penelitian ini adalah pada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP Negeri 27 Semarang, teknik pemilihan

informan dalam penelitian ini adalah *purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Moleong, 2002). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang-orang yang dianggap paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti agar memudahkan peneliti untuk melakukan penjelajahan obyek/situasi sosial yang diteliti. sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi

Pendekatan analisis data yang ditempuh dalam menganalisa data adalah pendekatan *emik* yaitu pendapat informan yang selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan melakukan tiga langkah secara bersamaan yaitu Reduksi data, Display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Taksonomi. Menurut Bungin analisis Taksonomi Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi, Triangulasi yang digunakan Triangulasi sumber (membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif)

E. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang dilihat melalui prinsip-prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif menurut Riant Nugroho, antara lain:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam program Bantuan Siswa Miskin (BSM) bahwasanya kebijakan sudah dinilai tepat namun tujuan dari kebijakan BSM ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebab siswa miskin yang seharusnya juga mendapatkan bantuan belum mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam pedoman umum dan juga dana bantuan terkadang juga disalahgunakan oleh orangtua untuk keperluan lain diluar tujuan BSM itu sendiri.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan Pelaksanaan dinilai tepat bahwa para implementor mengerti dan memahami siapa saja instansi yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan program BSM tingkat SMP di Kota Semarang, karena dapat menyebutkan hal yang sama dengan apa yang dimaksudkan dalam kriteria pelaksana program BSM, menurut informan para instansi tersebut telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya dalam menjalankan kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang.

3. Ketepatan Target

- ketepatan targetnya dilihat apakah sudah sesuai dengan rencana, belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang direncanakan, ini terbukti dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa informan mengatakan bahwa seperti yang sudah ditentukan sebelumnya bahwa target penerima bantuan siswa miskin ini adalah siswa yang orang tuanya memiliki KPS atau kartu perlindungan sosial, atau jika tidak, ada ketentuan lain yang mengaturnya yang mana siswa tersebut miskin dan rentan, tapi dalam kenyataannya ada siswa yang tidak pernah didaftarkan oleh sekolah dan juga tidak memenuhi kriteria sebagai penerima BSM malah mendapatkan bantuan.
- Jangkauan Target, Jangkauan Target diperlukan dalam hal upaya untuk pencapaian target-target yang telah direncanakan, pencapaian target jangkauan sasaran penerima BSM di Kota Semarang adalah siswa miskin yang mempunyai KPS, atau jika tidak mempunyai KPS adalah yatim/piatu, mempunyai kartu miskin, orang tua siswa terdaftar mempunyai kartu PKH (Program Keluarga Harapan). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu

terkendala oleh persyaratan dalam memperoleh BSM, hal ini tentu dapat menyebabkan hambatan dalam mencapai sasaran atau target

4. Ketepatan Lingkungan

- Sudah adanya interaksi yang dilakukan diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dilihat dari koordinasi ketika proses pelaksanaan program BSM tingkat SMP di Kota Semarang dijalankan, dalam hal ini koordinasi yang dilakukan adalah mulai dari kementerian pendidikan yang mana mereka menentukan dan menginformasikan mengenai BSM, Dinas Pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota, sekolah SMP penerima BSM dan pihak penyalur BSM sendiri yaitu Bank BRI atau dengan kantor POS
- persepsi atau pendapat publik dari adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini adalah sangat bagus, dikarenakan dengan adanya bantuan siswa miskin (BSM) ini dikatakan dapat membantu siswa dalam pemenuhan biaya sekolah.

5. Ketepatan Proses

- *Policy Acceptence* kebijakan ini sangat diperlukan dengan pemahaman bahwa kebijakan ini dapat mengurangi hambatan siswa

dari keluarga miskin untuk dapat terus bersekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan sekolah.

- *Policy Adoption* implementor menerima kebijakan program bantuan siswa miskin (BSM) dengan melakukan persiapan terkait dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan program BSM tingkat SMP di Kota Semarang.
- *Policy Readiness* Sudah mulai melaksanakan kebijakan BSM tingkat SMP di Kota Semarang, , Hal ini ditandai dengan mulai dari adanya surat edaran mengenai pelaksanaan program yang mana sudah diketahui oleh hampir seluruh sekolah-sekolah di Kota Semarang, serta sudah adanya proses pendataan siswa dari sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri di Kota Semarang yang dirasa memang membutuhkan bantuan

Keefektivan ketepatan implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang dipengaruhi beberapa faktor pendorong dan penghambat.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor tahu apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa bisa dijalankan dengan efektif dan efisien jika

informasi yang ada dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Keefektifan komunikasi bisa dilihat dari beberapa dimensi yang ada di dalam faktor komunikasi.

Pertama, Kejelasan Informasi yang diberikan dari implementor ditangkap oleh beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan BSM tingkat SMP di Kota Semarang sebagian besar para informan dalam menerima informasi yang diberikan oleh implementor dapat memahami dengan jelas.

Kedua, Menyangkut cara implementor menyampaikan informasi mengenai program BSM menginformasikan ke kepala-kepala sekolah sewaktu rapat dinas, dan melalui surat edaran kesekolah-sekolah, dan jika ada informasi yang mendesak mereka menginformasikannya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook atau Web Dinas Pendidikan Kota Semarang, sedangkan dari sekolah sendiri cara penyampaian program yaitu melalui guru-guru atau wali kelas yang akan mengajar dikelas dan disini dalam penyampaian informasi tidak ada sosialisasi yang dilakukan mengenai program BSM.

2. Sumber Daya

Pertama, Sumber daya manusia dari segi kualitas pelaksana program BSM sudah berstatus sarjana sehingga dapat dikatakan

sudah mampu menunjang pelaksanaan Program.

Kedua, Sumber daya manusia dari segi kuantitas masing-masing pelaksana baik itu di Dinas Pendidikan maupun di Sekolah hanya berjumlah 1 orang saja, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan Program BSM.

Ketiga, Anggaran, anggaran yang diterima oleh pihak implementor khusus untuk melaksanakan program BSM tidak ada.

Keempat, Informasi dan wewenang, informasi yang disampaikan dari instansi vertikal di atasnya, yaitu dari kementerian pendidikan dikordinasikan ke tingkat bawahnya sampai dengan tingkat sekolah.

Kelima, Fasilitas khusus yang disediakan untuk implementor dalam pelaksanaan program tidak ada, jadi fasilitas yang digunakan murni dari fasilitas yang sudah ada baik itu di Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun SMP Negeri 27 Semarang.

3. Disposisi

Dengan adanya disposisi para implementor dituntut untuk selalu berkomitmen dan memiliki sifat demokratis guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang

Pertama, Komitmen implementor dalam pelaksanaan kebijakan BSM tingkat SMP di Kota Semarang intensitas

pelayanan dari para implementor sudah bagus, hal ini dikarenakan mereka mengikuti pelaksanaan program BSM di Kota Semarang sesuai dengan sikap tanggung jawab mereka.

Kedua, Tingkat demokrasi dalam hal ini bisa diukur melalui Intensitas pelaksanaan pengawasan kebijakan BSM hanya dilakukan satu kali saja oleh para implementor, dan bentuk pengawasan yang dilakukan hanya dengan penyebaran form yang harus diisi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing staff sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa. Struktur birokrasi memiliki dua dimensi, yaitu: Kejelasan Tupoksi dan Kejelasan Standar Operating Procedures (SOP).

Pertama, Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh implementor. Pembagian tugas pokok dan fungsi ini dapat menimbulkan efektifitas dalam pelaksanaan suatu kebijakan, berdasarkan hal yang ditemukan dilapangan bahwa pihak pelaksana program bantuan siswa miskin sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan TUPOKSI yang ada.

Kedua, Kesesuaian dengan *Standar Operating Procedures* (SOP), temuan dilapangan kegiatan BSM tingkat SMP di Kota Semarang telah memiliki

Standar Operating Procedures (SOP) yang telah di berikan oleh Kementrian Pendidikan untuk mengatur tata cara dan pedoman dalam pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

F. PENUTUP KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan BSM tingkat SMP di Kota Semarang dapat dilihat dari 5 aspek yaitu : aspek Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan tareget, Ketepatan Lingkungan, Ketepatan Proses.

a. Ketepatan Kebijakan
Ketepatan kebijakan Program BSM sudah membantu siswa dari keluarga miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang baik namun masih ada kendala dimana dana tersebut terkadang disalahgunakan oleh orangtua siswa, dimana tujuan dari dana tersebut untuk membantu keperluan siswa malah digunakan untuk keperluan lain seperti pembelian barang-barang lain diluar perlengkapan sekolah siswa dan juga masih ada siswa yang membutuhkan bantuan namun tidak menerima karena terkendala dengan persyaratan seperti KPS.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan implementor dalam menjalankan Program BSM juga sudah mengetahui lembaga- lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Program BSM tingkat SMP di Kota Semarang serta Tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga sehingga menunjang pelaksanaan dan dapat berjalan dengan lancar

c. Ketepatan Target

Target yang ada belum dikatakan tepat karena target dari penerima bantuan siswa miskin (BSM) sendiri belum sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya.

d. Ketepatan Lingkungan

Dari segi lingkungan Dinas Pendidikan sudah berkomunikasi dengan baik dengan lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program BSM tingkat SMP di Kota Semarang, dan untuk masyarakat sendiri merespon dengan baik adanya Program BSM ini.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan Proses dalam implementasi Kebijakan BSM di Kota Semarang meliputi 3 hal yaitu :*Policy Acceptence, Policy Adoption,* dan *Policy Readiness.*

- *Policy Acceptence*

Dalam Pelaksanaan Program BSM tingkat SMP di Kota Semarang para implemntor menganggap bahwa kebijakan ini sangat diperlukan dengan pemahaman bahwa kebijakan ini dapat mengurangi hambatan siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus bersekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan sekolah.

- *Policy Adoption*

Para implementor melakukan persiapan terkait dengan tahapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan Program BSM berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan

- *Policy Readiness*

Implementor sudah mulai melaksanakan kebijakan BSM tingkat SMP di Kota Semarang dengan dimulai dari pendataan siswa yang akan didaftarkan untuk menerima BSM.

2. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMP di Kota Semarang.

a. Komunikasi

Dalam pelaksanaan program BSM ini tidak ada sosialisasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah maupun dinas pendidikan sendiri menyangkut pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin di Kota Semarang,

sehingga terkadang karena kurangnya sosialisasi mengenai BSM ini tujuan dari BSM ini tidak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti penggunaan dana BSM sendiri yang disalahgunakan oleh orangtua siswa sendiri.

b. Sumber Daya

Dari segi Sumber Daya dalam melaksanakan Program BSM masih kurangnya jumlah personil dalam melaksanakan Program dan juga tidak adanya dukungan berupa anggaran maupun fasilitas yang diberikan kepada Implementor dalam menjalankan Program BSM

c. Disposisi

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang masih terdapat kekurangan dimana intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Implementor terhadap Program masih minim yang mana pengawasan yang dilakukan hanya dengan pengisian form saja

d. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang para Implementor sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan TUPOKSI yang ada dan sudah mengacu pada *Standar Operating Procedures* (SOP) yang telah di berikan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengatur tata cara dan pedoman dalam pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini tentang pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SMP di Kota Semarang, dapat diberi saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya sosialisasi lebih mendalam mengenai Program BSM seperti pengadaan sosialisasi kepada orangtua maupun pihak pelaksana mengenai program BSM supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya dan juga supaya masyarakat lebih mengetahui apa itu Program BSM sendiri.
2. Diharapkan pihak pelaksana program dapat menambah jumlah personil yang nyata mampu atau dapat menunjang pelaksanaan program BSM, sehingga Program BSM dapat berjalan dengan efektif dan efisien
3. Perlu adanya pengawasan yang intens terhadap pelaksanaan Program BSM tingkat SMP di Kota Semarang seperti dari pihak pelaksana selalu memantau apakah program sudah dijalankan sebagaimana mestinya, tidak hanya melalui pengisian form saja tapi juga terjun langsung kelapangan melihat apakah program sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik(edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah .1990. *Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi*.Malang : IKIP YA3 Malang
- Islamy, M Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan Soerhatono, 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Keban, Yeremias T.. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava media
- Lilik, Mas Roro. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2008. *Publik policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Saebeni. Beni Ahmad.2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif R & D*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiadi A. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

II. Sumber Lain

Buku panduan pelaksanaan BSM Tingkat SMP Tahun 2013

BPS Kota Semarang : *Kota Semarang dalam Angka 2013*

BPS: Maret 2014, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 28 Juta.<http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>

Dispendik Kota Semarang.
Penerima BSM periode Januari-Juni.
<file:///D:/kampus/dokumen/arsip%20lama%202014/kampus/kawe/BSM%20KOTA%20SEMARANG%20D-SMP-SMA-SMK.pdf> , diakses tanggal 20 mei 2014, pukul 20.00 wib

Dinas Pendidikan Kota Semarang : *Profil Pendidikan Kota Semarang tahun 2013/2014*

Kliping pendidikan pendidikan kaum marjinal Sept 2013 - Des 2013

Republika online. Target BSM Belum Tercapai. 15 mei 2014

Sindonews.com. Target Penerima Bsm Jateng Sebanyak 2.155.151 Siswa. 15 mei 2014